ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 6380-6384
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Implikasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Rudi Hartono[1], Feragi Azizun Putra
[1,2] Universitas Muhammadiyah Kalianda
e-mail: rudihartono111977@gmail.com[1], Feragiazizunputra28021996@gmail.com[2]

Abstrak

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kebijakan strategis yang diterapkan di Indonesia sejak era reformasi dengan tujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, implementasi desentralisasi tidak selalu berjalan mulus, mengingat adanya tantangan seperti ketimpangan fiskal, rendahnya kapasitas aparatur daerah, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengolah data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta laporan dari berbagai lembaga riset dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan dampak positif bagi beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana pusat masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, masih terdapat ketimpangan antar-daerah dalam hal pertumbuhan ekonomi, akses layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa desentralisasi benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kata kunci: *Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kesejahteraan*

Abstract

Decentralization and regional autonomy are strategic policies implemented in Indonesia since the reform era with the aim of giving greater authority to regional governments in managing public resources and services. This policy is expected to improve community welfare by providing space for local governments to design policies that suit local needs. However, the implementation of decentralization does not always run smoothly, considering the existence of challenges such as fiscal imbalance, low capacity of regional officials, and the potential for abuse of authority. This research aims to analyze the extent to which decentralization and regional autonomy have an impact on the welfare of society in Indonesia. Using qualitative and quantitative approaches, this research processes data from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Home Affairs (Kemendagri), as well as reports from various research institutions and scientific journals. The research results show that although decentralization has had a positive impact on several regions with strong fiscal capacity, regions with high dependence on central funds still face various obstacles in improving the welfare of their communities. Apart from that, there are still disparities between regions in terms of economic growth, access to public services and government governance. More adaptive policies and a strict monitoring system are needed to ensure that decentralization truly brings benefits to all Indonesian society. Increasing the capacity of regional governments, strengthening transparency, and community participation in policy formulation are key factors in optimizing the positive impact of decentralization and regional autonomy policies.

Keywords: *Decentralization, Regional Autonomy, Welfare*

PENDAHULUAN

Desentralisasi telah menjadi fenomena global yang diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, kebijakan desentralisasi dimulai sejak reformasi 1998 dan semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, dalam implementasinya, desentralisasi tidak selalu memberikan dampak positif secara merata. Beberapa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi mampu memanfaatkan desentralisasi untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur, sementara daerah dengan ketergantungan tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU) masih mengalami keterbatasan dalam membangun daerahnya. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekitar 70% daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan. Ketimpangan ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah.

Selain ketimpangan fiskal, tantangan lain dalam implementasi desentralisasi adalah lemahnya kapasitas aparatur daerah. Survei LIPI (2023) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 40% pegawai pemerintah daerah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, korupsi di tingkat pemerintahan daerah juga menjadi isu yang menghambat efektivitas desentralisasi. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari sektor pemerintahan daerah, mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Penelitian ini berfokus pada dampak desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan menyoroti berbagai tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis data sekunder dari laporan pemerintah dan penelitian terdahulu. Data kuantitatif diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta berbagai jurnal ilmiah terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sumber Data yang digunakan berupa Data primer yaitu wawancara dengan pemangku kepentingan di pemerintahan daerah dan Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, laporan pemerintah. Menggunakan Teknik Analisis Data komparatif untuk melihat efektivitas desentralisasi di berbagai daerah serta menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mengolah data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari BPS tahun 2023, daerah dengan tingkat desentralisasi tinggi seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 5% dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana pusat seperti Papua mengalami pertumbuhan lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi yang didukung oleh kapasitas fiskal yang memadai cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 6380-6384
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025

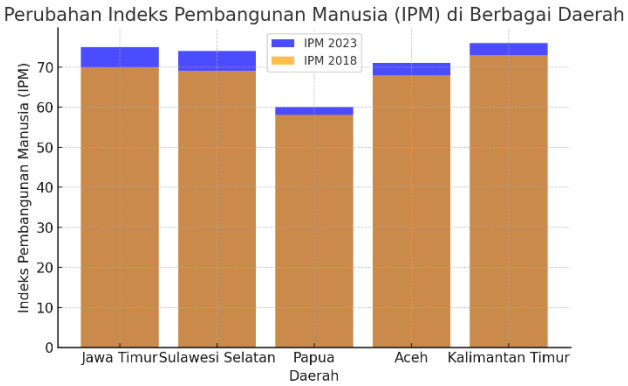

Laporan Kemendagri tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% APBD di daerah-daerah tertentu masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Data dari KPK tahun 2023 menunjukkan bahwa 60% kasus korupsi yang ditangani berasal dari pemerintah daerah, yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah. Survei LIPI 2023 menunjukkan bahwa hanya 40% pegawai pemerintah daerah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas mereka, sehingga menghambat efektivitas desentralisasi.

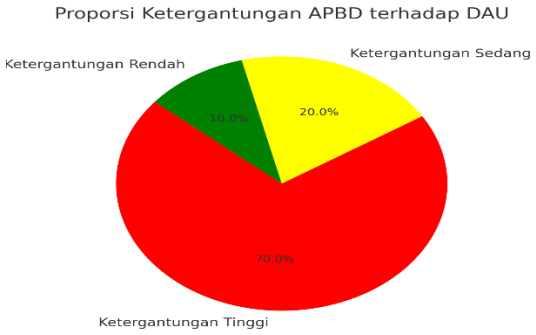

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dibandingkan daerah yang bergantung pada transfer dana pusat. Misalnya, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah sering kali mengalami kesulitan dalam membiayai program pembangunan sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Tantangan utama lain dalam pelaksanaan desentralisasi adalah adanya ketimpangan regional. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi pesat karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, sementara daerah lain masih tertinggal. Ketimpangan ini menyebabkan disparitas dalam akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya, daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan yang masih kekurangan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah guna mengurangi tingkat korupsi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik.

Korupsi, rendahnya kompetensi aparatur daerah, serta lemahnya pengawasan merupakan faktor penghambat utama dalam implementasi desentralisasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif, penguatan transparansi dalam pengelolaan

keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan juga harus terus didorong guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

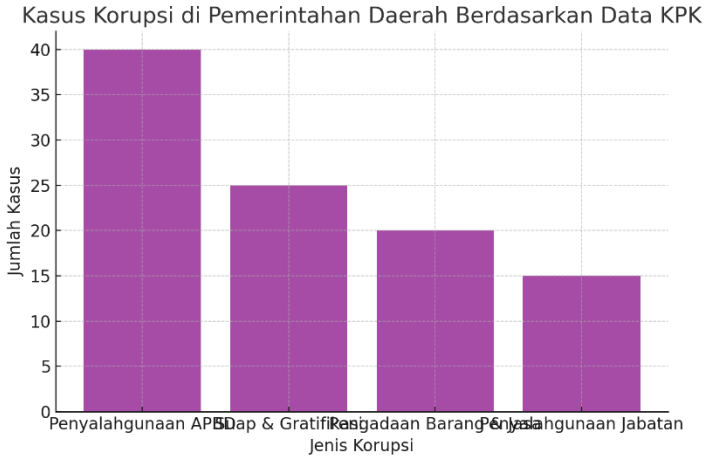

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi mampu mengoptimalkan kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, sementara daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana pusat masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, ketimpangan pembangunan antar-daerah tetap menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat dan daerah.

Dengan menerapkan strategi yang tepat, desentralisasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat harus tetap berperan sebagai fasilitator yang mengawasi dan mendukung daerah dalam menjalankan otonomi yang bertanggung jawab, sehingga tujuan utama dari desentralisasi dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS.

Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022*. Jakarta: Kemendagri.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Kasus Korupsi di Pemerintahan Daerah*. Jakarta: KPK.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2023). *Survei Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia*. Jakarta: LIPI.

Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.

Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: George Allen & Unwin.

Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416-424.

World Bank. (2023). *Decentralization and Local Governance: Global Trends and Best Practices*. Washington D.C.: The World Bank.

Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.

Faguet, J. P. (2012). *Decentralization and Popular Democracy: Governance from Below in Bolivia*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington D.C.: The World Bank.

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.

Smoke, P. (2003). Decentralization in Africa: Goals, Dimensions, Myths, and Challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16.